

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

Absori, 2016 “Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah: Suatu Tinjauan Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif”, *Prosiding konverensi nasional ke-4*.

Aziz Syamsuddi, Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 14-15

Bryan A Garner, Black's Law Dictionary Seventh Ediflon, West Group St Paul, Minn, 1990, hal.'1588

Collin Colbuild English Dictionary, 1997, hal. 1898, dalam Safri Nugraha, Pivatisation of Siafe Enterprises In The 20th Century A Step Forwards Or Backwards, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2004,hal. 1.

Chapra, M. Umar. 1970, “The Economic System of Islam (A Discussion of Its Goals and Nature): Part 3”, *Islamic Quarterly*, 14:3, Pro Quest LLC.

Esping-Andersen, G. 1990. *Three World of Welfare Capitalism*, Oxford: Oxford University Press.

Erwiningsih, Winahyu. Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Cet. 1, Penerbit Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 63

Elviandri, Dimiyati K, dan Absori. 2019. Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Hukum*, 31(2), 252-266.

Fuad, A. 2015. Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 5(1), hlm 15-32.

Gough, Ian. 2005. "Introduction: Definition, Measures, Problem of Method", dalam *European Welfare states: Explanations and Lessons for Developing Countries*. Arusha Conference, "New Frontiers of Social Policy". Hal 1-29.

Hans Kelsen, teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State) Diterjemahkan Rasul Muttakin, (Bandung, Cetakan ke IV, Nusa Media, 2010, hlm:179). Bandingkan Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2009), hlm 109

Klein, Lawrence R. 1954, *The Keynesian Revolution*, New York: Macmillan.

Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*

Naqvi, Haedar. 2003, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Neville Harris, "welfare state", *The New Oxford Companion to Law*.

Paul Spicker, *Social Policy: Themes and Approaches*, (London: Prentice Hall, 1995) sebagaimana dikutip Edie Suharto, "Negara Kesejahteraan Dan Reinventing Depsos", Makalah.

Rizal. M, Afrianti. R, dan Abdurahman. I. *Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi Pelaku Bisnis Coffe shop pada Masa Pandemi Terdampak COVID-19 di Kabupaten Purwakarta*. 2021. *Jurnal Inspirasi*, Vol. 12(1). Hal 97-105.

Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres. Hal 3.

Sadhu Bagas Suratno, "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik," E-Journal Lentera Hukum 4, no. 3 (2017): 164, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5499>.

Suharto, Edi, 2005. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Alfabeta, Bandung.

Suharto, Edi. 2006. *Peta dan dinamika welfare state di beberapa negara*. Bandung.

Triwibowo, Darmawan dan Bahagijo, Sugeng. 2006, *Mimpi Negara Kesahtraan*, Jakarta: Pustaka LP3ES.

Peraturan perundang-undangan:

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Instruksi menteri dalam negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

Pembukaan UUD 1945

Surat Edaran (SE) Nomor: HK.02.02/I/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945

Undang-Undang No 6 Taun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan

Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejateraan Sosial

Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Mahkamah Agung RI:

Putusan PN PADANG Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Putusan PN Garut No:15/Pen.pid.C/2021/PN.GRT

Berita:

Bahagijo, Sugeng. 2006, Mimpi Negara Kesejahteraan,
<http://www.theprakarsa.org/index.php?act=dtlpub&id=20081214174833>, diakses
tanggal 6 Januari 2022

BBC.News. "Bansos PPKM darurat dan level 4: Data penerima
'bermasalah', cerita warga: 'Jangankan dapat bantuan, didata saja tidak pernah!'"
28 Juli 2021

Mochammad Iqbal. Liputan 6. *Tukang Bubur di Tasikmalaya Didenda Rp
5 Juta karena Langgar PPKM Darurat.*(Juli 2021).

Sari, H.P. kompas.com. *Penurunan Kasus Covid-19 Diiringi Turunnya
Testing.* 2021